
Praktik Diplomasi Publik Republik Rakyat Cina Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Masyarakat Taiwan

Rizal Budi Santoso^{*1}, Taufik Hidayat², Windy Dermawan³

¹Magister hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

²Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

³Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

e-mail: *budisantosorizal@gmail.com, taufik_hidayat_hi@yahoo.com, windydermawan165@gmail.com

Abstract

This paper aims to explain the practice of public diplomacy of the People's Republic of China to the people of Taiwan in improving economic and social relations. Researchers see that the relationship between the People's Republic of China and the people of Taiwan focuses on economic relations which then have an impact on social interaction between the two communities. In analyzing the practice of public diplomacy of the People's Republic of China, researchers conducted an analysis based on the theory of public diplomacy put forward by Joseph Nye with the aim to find out how the practice of public diplomacy of the People's Republic of China towards the people of Taiwan in improving economic and social relations (2016-2018). The research method used in this research is to use qualitative methods. While in collecting data, researchers used literature studies and online searches. In conducting data analysis, researchers use data reduction. The results in this paper show that the public diplomacy of the People's Republic of China is often addressed to Taiwanese entrepreneurs with the appeal of the Chinese market that is integrated with the global market that is able to improve economic and social relations with the creation of a linkage community that is able to build and strengthen positive relations between the government of the Republic of China with the people of Taiwan.

Keywords—Public Diplomacy, People's Republic of China, People of Taiwan

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina terhadap masyarakat Taiwan dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial. Peneliti melihat bahwa hubungan antara Republik Rakyat Cina dengan masyarakat Taiwan berfokus pada hubungan ekonomi yang kemudian berdampak pada interaksi sosial antara kedua masyarakat. Dalam menganalisa praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina, peneliti melakukan analisis berdasarkan teori diplomasi publik yang dikemukakan oleh Joseph Nye dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina terhadap masyarakat Taiwan dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial (2016-2018). Metode riset yang digunakan dalam riset ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan studi pustaka serta penelusuran online. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan reduksi data. Hasil dalam tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Republik Rakyat Cina seringkali ditujukan kepada pengusaha Taiwan dengan daya tarik pasar Cina yang terintegrasi pasar global yang mampu meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial dengan terciptanya *linkage community* yang mampu membangun dan memperkuat hubungan positif antara pemerintah Republik Cina dengan masyarakat Taiwan.

Kata kunci—Diplomasi Publik, Republik Rakyat Cina, Masyarakat Taiwan

1. Pendahuluan

Hubungan antara Republik Rakyat Cina dengan Taiwan mempunyai prinsip dasar, yaitu mengesampingkan permasalahan politik dan mempromosikan kerjasama ekonomi. Republik Rakyat Cina dan Taiwan telah setuju untuk mematuhi konsensus 1992, hasil dari KTT non politik yang dihadiri oleh *Straits Exchange Foundation* (SEF), sebuah badan semi-resmi yang didirikan oleh Taiwan dan *the Association for Relations Across the Taiwan Strait* (ARATS) dari pihak Republik Rakyat Cina. Dalam pandangan Lin (2019), Republik Rakyat Cina berpendapat bahwa konsensus 1992 merupakan dasar dari interaksi yang dilakukan dalam hubungan Republik Rakyat Cina-Taiwan yang berpegangan pada prinsip *One-China* dan sebagai mekanisme pembangunan kepercayaan antara kedua pihak. Hal ini dikarenakan menurut Kang (2003), karakteristik dari prinsip *One China* dari pemerintah Republik Rakyat Cina adalah “hanya ada satu Republik Rakyat Cina di dunia dan Taiwan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Rakyat Cina, dan pusat pemerintahan Republik Rakyat Cina adalah di Beijing”. Dengan ini, Republik Rakyat Cina memberikan Taiwan status otonomi khusus dalam “*one country, two systems*”. Namun begitu bagi Taiwan lebih menegaskan bahwa Taiwan merupakan entitas politik yang mempunyai status yang setara dengan status dari Republik Rakyat Cina.

Perkembangan hubungan Republik Rakyat Cina dengan Taiwan saat ini mengalami ketergantungan ekonomi yang berkembang terlebih dengan di resmikannya pakta perdagangan bilateral *the Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) pada 2010 (Rigger &

Schubert, 2017). Melalui kerangka kerjasama ini hambatan perdagangan antara Republik Rakyat Cina dan Taiwan dihapuskan, menurut kementerian perdagangan Republik Rakyat Cina (2018), Taiwan menjadi mitra dagang terbesar bagi Republik Rakyat Cina dimana interaksi perdagangan antara Republik Rakyat Cina dengan Taiwan pada 1999 sebesar \$35 miliar, naik pada 2018 mencapai \$150,5 miliar. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan besar Taiwan menuai sebagian besar manfaat dari ikatan komersial yang lebih kuat dengan Republik Rakyat Cina, dimana para pengusaha Taiwan ini mendirikan pusat perusahaan dan pabriknya di Republik Rakyat Cina dengan harga tanah yang lebih murah dibandingkan di Taiwan membuat daya tarik Republik Rakyat Cina bagi pengusaha Taiwan semakin besar.

Dalam hubungan ekonomi yang semakin meningkat ini, memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial antara masyarakat Taiwan dengan Republik Rakyat Cina. Dalam Lin (2017) Republik Rakyat Cina telah memberikan daya tarik untuk mencari sebuah kesempatan untuk bekerja dan belajar di Republik Rakyat Cina bagi masyarakat Taiwan. Migrasi tenaga kerja Taiwan baik itu buruh ataupun tenaga terampil dan profesional yang berpengalaman yang datang ke Republik Rakyat Cina terus meningkat bahkan para lulusan muda dari universitas Taiwan juga langsung mencari kesempatan di Republik Rakyat Cina yang umumnya bekerja di kota besar seperti Shanghai dan Beijing .

Penelitian mengenai mengenai praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina sebagai upaya dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan belum banyak dikaji. Penelitian lain umumnya mengkaji mengenai hubungan

ekonomi antara Republik Rakyat Cina dengan Taiwan, seperti yang ditemukan dalam penelitian Chun-yi (2010), Chun-yi dan Ming Xi (2017), Weng (2017) yang berpendapat bahwa peningkatan hubungan ekonomi melalui perdagangan dan investasi tidak akan mendorong opini publik untuk mengarahkan kepada integrasi politik. Sementara itu penelitian lain mengkaji mengenai diplomasi publik Republik Rakyat Cina terhadap Taiwan yang dilakukan oleh Hung (2017), Keng dan Schubert (2010), Chun-yi (2010), Davidson (2015), Hsu (2014) menemukan bahwa Republik Rakyat Cina telah mempromosikan diplomasi publik ke Taiwan, yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran, mengimbangi citra negatif dan meningkatkan saling pengertian di bidang pendidikan, budaya dan interaksi sosial. Peneliti melihat bahwa pada tulisan sebelumnya belum cukup informasi terkait praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina sebagai upaya dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan. Karenanya, artikel ini akan menunjukkan peningkatan dalam hubungan Republik Rakyat Cina dengan masyarakat Taiwan melalui praktik diplomasi publik.

Dalam diplomasi publik seringkali menjalin hubungan dengan masyarakat asing dan mempertahankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan nasional suatu negara telah menarik minat peneliti untuk memperdalam praktik diplomasi publik sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan dengan negara lain. Artikel ini akan menjawab pertanyaan utama yaitu “bagaimana praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina dapat meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan?”.

2. Kerangka Konseptual

Soft Power bertumpu pada persuasi dan daya tarik dalam membentuk preferensi negara lain yang berpusat pada budaya, nilai-nilai, dan kebijakan luar negeri. *Soft Power* dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui persuasi dan daya tarik yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Nye, 2004). Dengan penggunaan persuasi yang semakin berkembang, telah mendorong perubahan dalam proses diplomasi. Diplomasi tradisional *government-to-government* yang identik dengan partisipatif pemerintah yang lebih terbuka telah berubah kedalam bentuk partisipatif masyarakat ke pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai diplomasi publik. Diplomasi tradisional berusaha untuk mengamankan niat baik pemerintah asing, diplomasi publik berarti mengamankan niat baik publik asing. Hal ini membuat diplomasi harus menjadi semakin umum untuk melayani kepentingan nasional suatu negara (Zaharna, 2010).

Rana (2011) mendefinisikan diplomasi publik sebagai, kegiatan-kegiatan di mana pemerintah, bekerja dengan badan-badan non-negara, menjangkau publik dan aktor-aktor non-negara di luar negeri, yang mencakup antara lain informasi, budaya, pendidikan, dan citra negara. Diplomasi publik juga mencakup kegiatan pemerintah yang diarahkan pada publik domestik, tentang urusan luar negeri dan citra jaringan diplomatiknya.

Diplomasi publik merupakan alat yang dapat menggunakan atau menghasilkan *soft power* dengan menghubungkan sumber daya *soft power* dengan hasil yang diinginkan. Nye menyebutnya dengan “konversi daya”, dimana proses komunikasi dan kolaborasi yang dapat mengubah sumber daya *soft power* menjadi daya tarik bagi publik asing dan

memperoleh hasil yang diinginkan (Nye, 2004). Masyarakat dipandang sebagai target dan instrumen kebijakan luar negeri dan upaya untuk menargetkan masyarakat secara lebih efektif (Hocking, 2005). Dalam bentuk diplomasi publik tradisional ini, sifatnya lebih kompetitif dimana kebijakan merupakan bagian dari strategi diplomasi bilateral, yang melayani kepentingan nasional dan yang bersaing dengan strategi negara lain (Pamment, 2012).

Fouts (2006) memaparkan bahwa diplomasi publik paling efektif ketika pertukaran yang berarti menemukan ekspresi yang dapat dibuktikan dalam pengembangan kebijakan dan tindakan negara. Ini jauh melampaui urusan publik, yang mencari lebih banyak informasi daripada membujuk. Selain itu, diplomasi publik memiliki lebih banyak kesamaan dengan dialog daripada propaganda, yang merupakan aliran informasi satu arah yang sering ditandai dengan ketidakakuratan dan bias. Sebagai permulaan, konstituensi domestik harus dipertahankan dan dipupuk jika tujuan kebijakan internasional selaras dengan warga negara. Dan melakukan penjangkauan semacam itu bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi para praktisi yang orientasi utamanya adalah internasional: kembali ke ibukota mereka dan orang-orang senegaranya berhadapan dengan dunia.

Menurut Kelley (2009) diplomasi publik “berkaitan dengan pengaruh sikap publik terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Ini mencakup dimensi hubungan internasional di luar diplomasi tradisional; pembentukan opini publik di negara lain; interaksi kelompok dan kepentingan pribadi di satu negara dengan yang lain; pelaporan urusan luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara diplomat dan

koresponden asing; dan proses komunikasi antar budaya.

Dalam artikel ini, peneliti akan menggunakan kerangka analisis yang dipaparkan oleh Joseph Nye yang membagi tujuan diplomasi publik menjadi tiga dimensi berbeda yang membutuhkan proporsi relatif berbeda dari informasi pemerintah langsung dan hubungan budaya jangka panjang:

Dimensi pertama adalah *daily communications*, yang melibatkan penjelasan konteks keputusan kebijakan dalam dan luar negeri. . . Dimensi *daily communications* juga harus melibatkan persiapan untuk menghadapi krisis dan melawan serangan. . . Dimensi kedua adalah *strategic communication*, di mana seperangkat tema sederhana dikembangkan, seperti apa yang terjadi dalam kampanye publik. . . Dimensi ketiga diplomasi publik adalah pengembangan hubungan dengan individu-individu kunci selama bertahun-tahun melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, dan akses ke saluran media. Masing-masing dari tiga dimensi diplomasi publik ini memainkan peran penting dalam membantu menciptakan daya tarik negara yang menarik dan ini dapat meningkatkan prospeknya untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Nye, 2004:107-110).

Melalui kerangka analisis yang dikemukakan oleh Nye ini, telah memberikan bentuk pada proses interaksi yang dilakukan dalam menciptakan dan meningkatkan hubungan negara dengan publik asing yang menjadi target diplomasi publik untuk meningkatkan keberhasilan dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam konteks artikel ini, kerangka analisis

dari Nye ini sangat relevan dengan artikel ini karena dapat menjelaskan mengenai persiapan mengenai diplomasi publik dalam kebijakan domestik dan luar negeri dalam menciptakan daya tarik bagi Republik Rakyat Cina untuk meningkatkan hubungan dengan Taiwan. Kerangka analisis nye juga menggambarkan interaksi komunikasi yang memberikan pesan yang dibuat khusus kepada masyarakat Taiwan untuk mendukung inisiatif kebijakan Republik Rakyat Cina dengan memberikan segala kebutuhan masyarakat Taiwan sehingga memunculkan respon yang diinginkan dari masyarakat Taiwan terhadap Republik Rakyat Cina.

Selain itu juga Nye menyebutkan bahwa perlu adanya pembangunan hubungan dengan individu dan kelompok yang sesuai dalam konteks artikel ini adalah masyarakat Taiwan, dengan harapan bahwa niat baik yang dihasilkan akan meningkatkan pemahaman mengenai Republik Rakyat Cina dan meningkatkan kemungkinan bahwa “hasil yang diinginkan” dari kepentingan nasional Republik Rakyat Cina akan terpenuhi.

3. Metode Penelitian

Dalam artikel ini akan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan proses dari praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina sebagai upaya dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan. Data yang mendukung dalam artikel ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur pada jurnal ilmiah, publikasi data, situs resmi dan situs lain mengenai pemahaman diplomasi publik dan data tentang praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina sebagai upaya dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan. Data yang digunakan

dalam analisa penelitian ini merupakan data dengan rentang tahun 2016-2018. Metode triangulasi dipilih untuk menyaring dan menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk dapat menggambarkan praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat Taiwan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Diplomasi Publik Republik Rakyat Cina Melalui Kerjasama Perdagangan dan Investasi dengan Taiwan

Reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Den Xiaoping mengeluarkan *open-door policy* yang bertujuan untuk membuka perdagangan dan investasi asing masuk ke Republik Rakyat Cina untuk pembangunan ekonomi Republik Rakyat Cina (Sung, 2005). Menurut Lo (2018) Republik Rakyat Cina berupaya untuk mengurangi pembatasan dan menyederhanakan prosedur untuk masuknya investasi asing. Republik Rakyat Cina juga menyediakan berbagai macam barang kepada konsumen di seluruh dunia dan sebagian besar produksi dari pabrik-pabrik Republik Rakyat Cina ini telah masuk kedalam pasar global. Kurang dari 40 tahun sejak reformasi ekonomi, Republik Rakyat Cina hari ini menjadi pemimpin bisnis global yang menjadi tempat bagi perusahaan global dan menjadi tujuan penanaman modal asing langsung (Xinhua, 2018).

Taiwan menjadi salah satu mitra dagang dan investor penting bagi Republik Rakyat Cina. Pasar Republik Rakyat Cina yang telah menyentuh pasar global membuat para pengusaha Taiwan ini tertarik untuk melakukan perdagangan dan

menanamkan modalnya di Republik Rakyat Cina. Karenanya banyak pengusaha Taiwan memindahkan perusahaan dan pabriknya dari Taiwan ke Republik Rakyat Cina (Sung, 2005).

Dalam konteks diplomasi publik, Republik Rakyat Cina telah mengarahkan diplomasi publiknya kepada pengusaha Taiwan yang tertarik untuk memindahkan perusahaan dan pabriknya ke Republik Rakyat Cina. Dalam pandangan peneliti, penciptaan *daily communications*, reformasi kebijakan ekonomi Republik Rakyat Cina melalui *open-door policy* telah menjadi dasar persiapan dari kebijakan dalam negeri Republik Rakyat Cina untuk memberikan daya tarik bagi para pengusaha Taiwan untuk datang ke Republik Rakyat Cina, salah satunya adalah dengan mempromosikan upah buruh yang rendah dan harga tanah yang murah. Pemerintah Republik Rakyat Cina juga memberikan jaminan minimnya tuntutan hak-hak pekerja dan peraturan lingkungan yang tidak terlalu ketat agar dapat menurunkan biaya manufaktur dari perusahaan milik pengusaha Taiwan.

Bagi peneliti, hal ini telah memberikan daya tarik bagi pengusaha Taiwan untuk menjadikan Republik Rakyat Cina sebagai negara tujuan pengusaha Taiwan untuk melakukan perdagangan dan investasi mengingat dari segi jarak yang dekat dan dilengkapi dengan tenaga kerja yang melimpah dan murah telah menarik pengusaha Taiwan untuk melakukan perdagangan dan investasi langsung di Republik Rakyat Cina. Pada 2008, tercatat lebih dari 200.000 perusahaan Taiwan telah mendirikan perusahaan dan pabriknya di Republik Rakyat Cina dengan membawa lebih dari US\$ 166 miliar dana investasi (Higgins, 2012). Menurut Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina (2018), pada 2015 menempatkan Taiwan sebagai

mitra dagang terbesar pada peringkat empat.

Taiwan sebagai salah satu mitra dagang terbesar Republik Rakyat Cina ini tak lepas dari kontribusi pakta perdagangan *the Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) dan *the Cross-Strait Trade in Service Agreement* (CSTSA), dan juga membentuk *the Cross-Strait Economic Cooperation Committee*. Isi perjanjian ini termasuk dimulainya transportasi langsung dan pasca-layanan khususnya, pembukaan wisatawan Republik Rakyat Cina ke Taiwan, dan kerja sama lintas-Selat di bidang keamanan pangan, keuangan, penumpasan kejahatan, inspeksi produk, urusan awak kapal, perlindungan hak kekayaan intelektual, kedokteran dan kesehatan, keamanan energi nuklir, perlindungan investasi, kerja sama bea cukai, keselamatan penerbangan sipil, dan penghindaran pajak berganda.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ekonomi Republik Rakyat Cina (2017), sebagian besar dari 23 perjanjian terkait langsung dengan pertukaran ekonomi dan sosial. Akibatnya, volume perdagangan lintas-Selat telah meningkat dengan cepat dari US\$ 124,5 miliar pada 2007 menjadi US\$ 145,4 miliar pada 2010, US\$ 169 miliar pada 2012, US\$ 198,3 miliar pada 2014, turun menjadi US\$ 179,6 miliar pada 2016, tetapi bangkit kembali hingga US\$ 199,4 miliar pada 2017, naik 11,3 %. Sementara itu, ekspor Taiwan ke Republik Rakyat Cina mencapai US\$ 155,4 miliar dan impor dari Republik Rakyat Cina mencapai US\$ 44 miliar pada 2017, dengan surplus US\$ 111,4 miliar. Menurut Biro Perdagangan Luar Negeri di Taiwan, jumlah perdagangannya dengan Republik Rakyat Cina (termasuk Hong Kong dan Makau) adalah US\$ 181,96 miliar pada 2017, naik 15,4 % dari pada 2016, menyumbang 31,56 % dari total perdagangannya (US\$ 576,51 miliar).

Ekspor Taiwan ke Republik Rakyat Cina berjumlah US\$ 130,39 miliar, naik 16 % dari tahun 2016 dan merupakan 41 % dari total eksportnya (US\$ 317,24 miliar), sementara eksportnya ke Amerika Serikat dan Jepang masing-masing masing-masing sebesar 11,6 % dan 6,3 %.

Pada 2018, Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina (2018) mengeluarkan data terkait total perdagangan antara Republik Rakyat Cina dan Taiwan adalah US\$ 226,24 miliar, meningkat 13,2 %. Ekspor Republik Rakyat Cina ke Taiwan adalah US\$ 48,647 miliar, naik 10,6 %, untuk impor dari Taiwan US\$ 177,598 miliar, naik 13,9 %, defisit perdagangan China dengan Taiwan US\$ 128,951 miliar. Taiwan adalah mitra dagang terbesar kelima kami dan sumber impor terbesar ketiga. Republik Rakyat Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan dan sumber surplus perdagangan.

Surplus perdagangan Taiwan yang diuntungkan dari perdagangan lintas-Selat berkisar antara US\$ 60 dan 80 miliar menurut statistiknya sendiri, tetapi mencapai lebih dari US\$ 110 miliar menurut angka Republik Rakyat Cina (Kementerian Ekonomi Republik Rakyat Cina, 2017). Dalam pandangan peneliti, Republik Rakyat Cina menikmati total perdagangan yang jauh lebih besar daripada Taiwan, yang membuat ketergantungan Taiwan pada Republik Rakyat Cina jauh lebih berat daripada sebaliknya. Karena lebih sulit untuk menemukan pasar baru untuk ekspor daripada sumber-sumber baru untuk impor, begitu perdagangan lintas-selat terganggu karena konfrontasi politik, Taiwan akan lebih menderita secara ekonomi daripada Republik Rakyat Cina.

Diplomasi publik Republik Rakyat Cina melalui sektor ekonomi ini telah memanfaatkan kerjasama perdagangan antara Republik Rakyat Cina dengan para pengusaha Taiwan dalam meningkatkan

hubungan dengan masyarakat Taiwan baik dalam hubungan ekonomi dan sosial. Peneliti melihat bahwa kebijakan mengenai upah buruh yang rendah dan harga sewa tanah yang murah dapat masuk kedalam *strategic communication*, dari diplomasi publik Republik Rakyat Cina karena memberikan daya tarik dalam mempromosikan kerjasama perdagangan dan investasi kepada pengusaha Taiwan untuk datang ke Republik Rakyat Cina sehingga dapat mendukung *daily communications* yang telah terbentuk.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa Republik Rakyat Cina berupaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dengan pengusaha Taiwan sehingga dapat mengembangkan hubungan dengan pengusaha Taiwan berdasarkan daya tarik yang dimiliki Republik Rakyat Cina melalui pasar Republik Rakyat Cina yang terintegrasi kedalam pasar global. Hubungan ini bersifat cair sehingga dapat menumbuhkan hubungan positif antara pemerintah Republik Rakyat Cina dengan pengusaha Taiwan.

Bagi peneliti, dengan adanya kerjasama antara Republik Rakyat Cina dengan pengusaha Taiwan telah menciptakan jaringan yang mampu menyebarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Republik Rakyat Cina khususnya dalam konten ekonomi yang dapat mengirimkan pesan-pesan diplomasi publik dari pemerintah Republik Rakyat Cina yang informasi pengirim dan penerimanya tidak dapat teridentifikasi secara jelas karena memanfaatkan dinamika komunikasi dari baik dari satu-ke-satu, ataupun banyak-ke-banyak.

Sementara itu, investasi Taiwan di Republik Rakyat Cina telah tumbuh selama bertahun-tahun, meskipun mengalami lebih banyak pasang surut. Menurut angka statistik yang disediakan oleh Taiwan dalam penelitian Tsai (2017), investasi

langsungnya di Republik Rakyat Cina yang disetujui oleh Taiwan meningkat dari US\$ 1,07 miliar pada 2008 menjadi US\$ 1,98 miliar pada 2012. Menurut statistik dari Kementerian Ekonomi Republik Rakyat Cina (2017), pemerintah Republik Rakyat Cina menyetujui 2360 proyek yang diinvestasikan Taiwan pada 2008, dengan penggunaan aktual modal Taiwan mencapai US\$ 1,9 miliar, naik 7,0 % dari tahun sebelumnya, meskipun proyek yang baru disetujui turun 28,5 % secara komparatif. Tahun 2010 menyaksikan peningkatan dalam proyek yang disetujui dan penggunaan aktual modal Taiwan; proyek yang disetujui meningkat sebesar 20,2 % dan modal tumbuh sebesar 31,7 %.

Dalam pandangan peneliti, Pemerintah Republik Rakyat Cina ini selalu menekankan kebijakan terkait hubungan dengan Taiwan yang mengarah langsung kepada masyarakat Taiwan dalam hal ini para pengusaha Taiwan. Kebijakan untuk mempromosikan pertukaran ekonomi dan budaya dengan Taiwan telah membawa hubungan ekonomi Republik Rakyat Cina dengan Taiwan menjadi saling terikat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada penyerapan modal dari investasi yang dilakukan oleh Taiwan di Republik Rakyat Cina terhadap proyek-proyek pembangunan yang dimiliki Republik Rakyat Cina yang menjadikan Taiwan sebagai sumber investasi terbesar bagi Republik Rakyat Cina.

4.2 *Linkage Community*

Masyarakat Taiwan yang bekerja di Republik Rakyat Cina merupakan anggota angkatan kerja global yang meningkat karena daya tarik dari pasar ekonomi Republik Rakyat Cina yang dinamis dan terintegrasi dengan pasar global. Interaksi antara masyarakat Republik Rakyat Cina dengan Taiwan menjadi semakin tidak terhindarkan. Dengan bekerja dan tinggal

di antara masyarakat Republik Rakyat Cina, masyarakat Taiwan ini belajar mengenai Republik Rakyat Cina dan masyarakat Republik Rakyat Cina selain itu juga semakin erat hubungan dengan adanya pernikahan antara masyarakat Republik Rakyat Cina dengan Taiwan yang disebut dengan *linkage community*.

Linkage community ini yang idealnya menjadi sarana dalam membangun saling pengertian dan kepercayaan dengan menciptakan ikatan pribadi antara kedua masyarakat dan menceritakan pengalaman mengenai Republik Rakyat Cina pada saat kembali ke Taiwan. Dengan semakin banyak pernikahan yang terjadi antara masyarakat Republik Rakyat Cina dengan Taiwan telah menjadikan salah satu sarana yang menjanjikan dalam memacu integrasi sosial antara kedua masyarakat.

Peneliti melihat bahwa fenomena *linkage community* ini dapat mempengaruhi kebijakan Republik Rakyat Cina terhadap Taiwan. Pada 2008, dalam mempromosikan *daily communications* antara masyarakat Republik Rakyat Cina dengan Taiwan, pemerintah Republik Rakyat Cina menerapkan kebijakan untuk memberikan kartu identitas khusus kepada masyarakat Taiwan yang tinggal dan bekerja di Republik Rakyat Cina dengan memberikan sejumlah insentif yang merupakan salah satu bagian tema dari *strategic communications* sebagai daya tarik. Dalam perspektif diplomasi publik, menurut Leonard (2002) diplomasi publik yang paling efektif adalah ketika diplomasi publik diintegrasikan dengan kebijakan daripada hanya sekedar pertimbangan atau pasca justifikasi kebijakan.

Gambar 1. Kartu Identitas Khusus Warga Taiwan



Sumber: (Chung, 2018)

Saat ini masyarakat Taiwan yang tinggal secara permanen di Republik Rakyat Cina kurang lebih satu sampai dua juta jiwa (Rigger & Schubert, 2017). Sementara itu penerima kartu identitas khusus dari pemerintah Republik Rakyat Cina baru sebesar 22.000. Pemegang izin berhak atas tunjangan dan hak istimewa termasuk pekerjaan, akses ke skema dana perumahan, perawatan medis dasar, bantuan hukum, dan asuransi sosial. Mengajukan permohonan izin mengemudi, mengejar penerbangan domestik dan kereta api, dan mengikuti tes kualifikasi profesional juga lebih nyaman, menurut peraturan yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2018. Hal ini merupakan upaya Republik Rakyat Cina dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat Taiwan untuk pindah ke Republik Rakyat Cina.

Bagi peneliti, pengembangan hubungan antar individu ini melalui *linkage community* ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi interaksi sosial yang lebih bersahabat dan dapat mempengaruhi kebijakan Taiwan terhadap Republik Rakyat Cina. Hal ini dikarenakan *linkage community* lahir dari adanya integrasi ekonomi yang dapat menuntut kebijakan dari pemerintah Taiwan mengenai kebijakan liberal yang dapat

memungkinkan masyarakat Taiwan ini untuk bepergian dari Taiwan ke Republik Rakyat Cina ataupun Republik Rakyat Cina ke Taiwan dengan mudah. Selain itu juga *linkage community* ini percaya bahwa dengan bekerjasama dengan Republik Rakyat Cina dapat mempertahankan posisi Taiwan dalam pasar internasional yang sangat kompetitif. Secara keseluruhan, "*linkage communities*" Taiwan telah diyakinkan oleh Republik Rakyat Cina melalui diplomasi publiknya, bahwa masa depan ekonomi Taiwan dan kemakmurannya terkait dengan integrasi Republik Rakyat Cina ke dalam ekonomi global.

4.3 Pertukaran Pelajar

Meskipun kedua belah pihak belum menandatangani perjanjian resmi tentang pertukaran budaya dan pendidikan, universitas, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi budaya dan kesehatan antara kedua belah pihak mengambil inisiatif untuk melembagakan pertukaran sipil dalam domain mereka. Secara statistik menurut Chou dan Ching (2012), 235.591 profesional Republik Rakyat Cina di sektor budaya dan pendidikan dari total 2.712.572 pengunjung Republik Rakyat Cina (dalam 20 kategori) melakukan perjalanan ke Taiwan selama 1988 dan 2009. Secara khusus, 18.907 siswa Republik Rakyat Cina mengunjungi Taiwan secara resmi antara 1 Januari 2002 dan 31 Oktober 2009. Pada 2010, Taiwan mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mulai mengakui ijazah dari 41 universitas di Republik Rakyat Cina dan untuk menerima siswa Republik Rakyat Cina ke dalam sistem pendidikan *postsecondary* Taiwan.

Sejak itu, siswa jangka pendek dari Republik Rakyat Cina melompat dari 11.227 pada tahun 2011 menjadi 32.648

pada tahun 2016, tetapi turun ke 25.824 pada tahun 2017. Siswa Republik Rakyat Cina yang mencari gelar di Taiwan dimulai dengan jumlah 928 pada tahun 2011 dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 (3019), dan kemudian menurun menjadi 2835, dan 2139 pada 2016 dan 2017 masing-masing. Pada tahun 2017 siswa jangka pendek dan sarjana berjumlah 35.286, lebih rendah dari angka pada tahun 2015 dan 2016 (Mainland Affairs Council Republic of China, 2018).

Tabel 1. Statistik siswa Republik Rakyat Cina yang sedang Kuliah di Taiwan (2011–2018)

Tahun	Siswa Jangka Pendek	Mahasiswa Terdaftar		Total (Mahasiswa Jangka Pendek + Sarjana)
		Penerimaan (hanya siswa baru)	Terdaftar (termasuk siswa yang ada)	
2011	11,227	928	928	12,115
2012	15,590	951	1864	17,454
2013	21,233	1822	3554	24,787
2014	27,030	2553	5881	32,911
2015	34,114	3019	7813	41,927
2016	32,648	2835	9327	41,975
2017	25,824	2139	9462	35,286
2018	20,597	2140	9006	29,603
Total	188,263	16,387	-	-

Sumber: (Mainland Affairs Council Republic of China, 2018)

Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa Republik Rakyat Cina telah mempromosikan *daily communications* dengan memanfaatkan pertukaran antara pelajar Republik Rakyat Cina dengan Taiwan dalam membangun dan memperkuat sentimen positif mengenai Republik Rakyat Cina yang nantinya mengembangkan hubungan antar individu ini penciptaan kelompok-kelompok yang berisikan campuran pelajar Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Dalam konteks diplomasi publik pertukaran pelajar ini merupakan sebuah sarana dalam melakukan manajemen kelompok untuk membangun diplomasi publik Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang, melalui komunitas individu yang bersatu di sekitar

afinitas budaya bersama yang membuat hubungan positif antara Republik Rakyat Cina dengan masyarakat Taiwan.

Jumlah siswa Taiwan yang belajar di universitas di Republik Rakyat Cina terus meningkat sejak 2010. Mulai dari tahun itu, *strategic communications* dipersiapkan oleh departemen pendidikan di Republik Rakyat Cina menyetujui siswa Taiwan untuk menggunakan nilai ujian yang mereka capai di Taiwan untuk mendaftar ke universitas di Republik Rakyat Cina. Statistik dari Departemen Pendidikan Republik Rakyat Cina menunjukkan bahwa pada tahun 2011 total 7.346 siswa Taiwan belajar di universitas dan lembaga riset di Republik Rakyat Cina, termasuk Universitas Peking, Universitas Tsinghua, Universitas Renmin Republik Rakyat Cina, Universitas Jinan di provinsi Guangdong, serta Xiamen Universitas dan Universitas Huaqiao di provinsi Fujian. Jumlah tersebut meningkat menjadi 10.870 pada tahun 2015, berkat kebijakan preferensial Republik Rakyat Cina untuk menarik lebih banyak siswa Taiwan, seperti membebaskan biaya kuliah yang sama dari siswa Taiwan dan siswa Republik Rakyat Cina dan menyiapkan beasiswa khusus untuk siswa Taiwan untuk mendukung studi mereka. Hal ini juga membawa siswa Taiwan ke dalam sistem asuransi kesehatan dasar untuk penduduk kota Republik Rakyat Cina pada tahun 2013 (Xinying, 2015).

Langkah-langkah baru yang diambil oleh Republik Rakyat Cina memberi siswa Taiwan dan lulusannya status yang sama dengan siswa Republik Rakyat Cina dan memberikan mereka akses yang lebih besar ke universitas Republik Rakyat Cina, kualifikasi profesional, dan peluang kerja. Langkah-langkah ini seharusnya membawa lebih banyak pemuda Taiwan yang berkualitas ke Republik Rakyat Cina. Dengan langkah-langkah baru yang

dimulai pada Oktober 2017, lebih banyak siswa sekolah menengah dari Taiwan dapat mendaftar ke universitas Republik Rakyat Cina dan menerima beasiswa yang dapat dipertahankan di lembaga-lembaga Republik Rakyat Cina. Kementerian Pendidikan RRC meminta universitas-universitas Republik Rakyat Cina untuk melonggarkan persyaratan masuk bagi siswa Taiwan sehingga lulusan sekolah menengah Taiwan dengan nilai kelulusan (50% teratas, sekitar 75.000 siswa per tahun) dapat mendaftar.

Lebih dari 200 universitas Republik Rakyat Cina menyetujui siswa dengan skor lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya (12,5% teratas untuk tahun 2010 dan 25% teratas pada 2011) dalam Tes Kemampuan Skolastik Umum, ujian masuk perguruan tinggi Taiwan. Di belakang langkah-langkah baru ini adalah Beijing pertimbangan strategis untuk memenangkan hati para pemuda Taiwan, yang dianggap oleh administrasi DPP sebagai apa yang disebut tianrandu — pendukung alami bagi kemerdekaan Taiwan (Leung & Sharma, 2018).

Peneliti melihat bahwa penerimaan pelajar Taiwan yang ingin melanjutkan pendidikannya di Republik Rakyat Cina berpotensi meningkatkan dialog antar pelajar Republik Rakyat Cina dengan Taiwan sehingga dapat menyediakan ruang bagi pemerintah Republik Rakyat Cina untuk mempromosikan kebijakan dan memajukan pemahaman, rasa hormat, dan hubungan lintas-selat. Penciptaan ruang dalam pendidikan ini akan mendorong lebih lanjut pelajar Republik Rakyat Cina dan Taiwan untuk berkolaborasi dalam melakukan riset bersama untuk memajukan visi bersama. Kolaborasi sebagai bentuk diplomasi publik mengacu pada inisiatif di mana peserta dari berbagai negara berpartisipasi dalam suatu proyek bersama. Proyek-proyek ini dapat bersifat jangka

pendek dengan titik akhir yang jelas, seperti memainkan atau menulis karya musik atau lebih besar dalam skala dan jangka panjang seperti partisipasi berdampingan dalam upaya rekonstruksi bencana alam.

Kolaborasi yang dibangun antar pelajar Republik Rakyat Cina dan Taiwan hasil dari pengembangan hubungan individu-individu antara pelajar dengan pemerintah Republik Rakyat Cina dan Taiwan demi memasukan tujuan dan hasil yang konkret dan mudah diidentifikasi yang memberikan dasar dan struktur yang berguna untuk membentuk hubungan yang solid diantara para pelajar Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Interaksi antar individu yang terlibat dapat meningkatkan pemahaman untuk membangun atau mencapai sesuatu bersama yang akan terikat oleh pengalaman atau prestasi bersama yang diraih.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa, praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina terhadap masyarakat Taiwan dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial pada 2016-2018 menekankan bahwa fungsi diplomasi publik adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman dan berkomunikasi dengan masyarakat Taiwan, praktik diplomasi publik Republik Rakyat Cina terhadap masyarakat Taiwan saat ini hanyalah alat bagi Republik Rakyat Cina untuk melaksanakan kebijakannya. Komunikasi itu sendiri sebenarnya bukan komunikasi timbal balik, melainkan lebih merupakan pertukaran ide dan berkolaborasi. Hal ini dikarenakan meningkatnya hubungan ekonomi antara Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Peningkatan hubungan ekonomi dan sosial ini merupakan sebuah indikasi dari adanya

jalan menuju integrasi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dihindari lagi.

Penggunaan diplomasi publik baik oleh Republik Rakyat Cina dapat dilakukan dengan pendekatan keilmuan lain agar semakin memperkaya konsep dan gagasan dari diplomasi publik itu sendiri. Peneliti mengharapkan pada penelitian selanjutnya penggunaan pendekatan diplomasi publik baru dan paradiplomasi dalam melakukan penelitian mengenai hubungan Republik Rakyat Cina dan Taiwan.

Daftar Pustaka

- Chou, C. P., & Ching, G. (2012). Taiwan Education at the Crossroad. In *Taiwan Education at the Crossroad*. <https://doi.org/10.1057/9780230120143>
- Chun-yi, L. (2010). Between Dependency and Autonomy – Taiwanese Entrepreneurs and Local Chinese Governments. *Journal of Current Chinese Affairs*, 39(1), 37–71.
- Davidson, L. E. (2015). Linked Without Linking: The Role of Mainland China's Taiwanese Students in Cross-Strait Unification. *ASIANetwork Exchange: A Journal for Asian Studies in the Liberal Arts*, 22(2), 2. <https://doi.org/10.16995/ane.155>
- Fouts, J. S. (2006). Public Diplomacy: Practitioners, Policy Makers, and Public Opinion. In J. S. Fouts (Ed.), *USC Center on Public Diplomacy & the Pew Research Center*. Los Angeles: USC Center on Public Diplomacy & the Pew Research Center.
- Higgins, A. (2012). Tycoon prods Taiwan closer to China - The Washington Post. Retrieved November 20, 2019, from Washingtonpost.com website: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/tycoon-prods-taiwan-closer-to-china/2012/01/20/gIQAhswmFQ_story.html
- Hocking, B. (2005). Rethinking the 'New' Public Diplomacy. In *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations* (pp. 28–45). New York: Palgrave Macmillan.
- Hsu, C. (2014). China 's Influence on Taiwan 's Media. *Asian Survey*, 54(3), 515–539.
- Hung, T.-C. (2017). *Rethinking Public Diplomacy: A Study of China Exerting its Influence on Taiwan by Tzu-Chieh Hung to A Thesis Submitted to the Graduate Scholl of Asian-Pacific Studies of Waseda University, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doc* (the Graduate Scholl of Asian-Pacific Studies of Waseda University). Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/159504351.pdf>
- Kang, J. Y. (2003). From “Creeping Independence” to Reluctant Realism? China-Taiwan Relations under the DPP. *International Area Studies Review*, 6(2), 21–42. <https://doi.org/10.1177/223386590300600202>
- Kelley, J. R. (2009). Between “Take-offs” and “Crash Landings” Situational Aspects of Public Diplomacy. In N. Snow & P. M. Taylor (Eds.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (pp. 72–85). New York: Routledge.
- Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina. (2018). China-Taiwan economic and trade exchanges in 2018. Retrieved December 4, 2019, from Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Cina website: <http://tga.mofcom.gov.cn/article/sjzl/t>

- aiwan/201901/20190102828082.shtm
l
- Kementerian Perdagangan Republik Taiwan. (2017). Analysis of International Trade Situation over the Years. Retrieved December 4, 2019, from Kementerian Perdagangan Republik Taiwan website: https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1590&pid=644950&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0
- Keng, S., & Schubert, G. (2010). Agents of Taiwan-China Unification? The Political Roles of Taiwanese Business People in the Process of Cross-Strait Integration. *Asian Survey*, 50(2), 287–310.
- Lee, C. Y., & Yin, M. X. (2017). Chinese investment in Taiwan: A challenge or an opportunity for Taiwan? *Journal of Current Chinese Affairs*, 46(1), 37–59.
- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). *Public Diplomacy*. London: Foreign Policy Centre.
- Leung, M., & Sharma, Y. (2018). China's equal status policy causes Taiwan brain drain. Retrieved December 11, 2019, from universityworldnews.com website: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180301165622684>
- Lin, G. (2017). Taiwan's Developmental Experience for the Chinese Mainland: The Perspective of Chinese Intellectuals. In S. Tsang (Ed.), *Taiwan Impact On China, Why Soft Power Matters More than Economic or Political Inputs*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lin, G. (2019). *Taiwan's Party Politics and Cross-Strait Relations in Evolution (2008–2018)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lo, S. (2018). Beijing's new Taiwan policies reveal its plans for greater integration. Retrieved December 7, 2019, from South China Morning Post website: <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2137032/beijings-new-taiwan-policies-reveal-its-plans-greater>
- Mainland Affairs Council Republic of China. (2018). Statistics on Mainland Students Researching and Studying for Degrees in Taiwan. Retrieved December 11, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China website: https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=CA7B5FA9C0EC7005&sms=D645444CA321A4FA&s=54D121541C911FB1
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. <https://doi.org/10.2307/40204149>
- Pamment, J. (2012). New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice. In *New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice*. <https://doi.org/10.4324/9780203096734>
- Rana, K. S. (2011). *21st Century Diplomacy - A Practitioner's Guide*. London: The Continuum International Publishing Group.
- Rigger, S., & Schubert, G. (2017). Taiwan's Contribution to China's Economic Rise and Its Implications for Cross-Strait Integration. In S. Tsang (Ed.), *Taiwan's Impact on China* (pp. 95–125). The Nottingham China Policy Institute Series.
- Sung, W.-Y. (2005). *The Emergence of Greater China The Economic Integration of Mainland China, Taiwan and Hong Kong*. New York: Palgrave Macmillan.

- Tsai, C. (2017). The Nature and Trend of Taiwanese Investment in China (1991–2014): Business Orientation, Profit Seeking, and Depoliticization. In L. Dittmer (Ed.), *Taiwan and China* (pp. 133–150). California: University of California Press.
- Weng, L. C. D. (2017). Can economic profit influence public opinion? Observing generational change on cross-strait relations in Taiwan. *Asian Journal of Comparative Politics*, 2(4), 362–384.
<https://doi.org/10.1177/2057891116687878>
- Xinhua. (2018). China says FDI up 7.9 pct in 2017. Retrieved from Xinhua Net website:
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/16/c_136899958.htm
- Xinying, Z. (2015). More Taiwan students studying in mainland universities. Retrieved December 11, 2019, from Chinadaily.com.cn website:
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/06/content_22392239.htm
- Zaharna, R. S. (2010). *Battles to Bridges, U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11 Studies* (R. S. Zaharna, Ed.). New York: Palgrave Macmillan.